

Implementasi Program Penyuluhan Pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Walantaka Kecamatan Walantaka Kota Serang

Muhamad Fatawa Alam Ghiri ^{1*}

¹ Universitas Pamulang Kampus Serang

*Corresponding Email: alamghirix@gmail.com

Abstrak: Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya peran penyuluhan pertanian sebagai instrumen strategis pembangunan pertanian nasional, serta adanya kesenjangan antara ketentuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dengan kondisi di lapangan, seperti keterbatasan jumlah tenaga penyuluh, rendahnya partisipasi aktif petani, serta belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan penyuluhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program penyuluhan pertanian di BPP Walantaka, yang ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, serta merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam kepada Ketua sekaligus Koordinator Penyuluhan Pertanian BPP Walantaka, Penyuluh Pertanian, unsur Kecamatan Walantaka, petani binaan aktif, serta petani yang belum atau tidak terdaftar sebagai binaan BPP Walantaka, dan studi dokumentasi terhadap program penyuluhan serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan gambaran implementasi program penyuluhan pertanian di BPP Walantaka dilihat dari komunikasi antarlembaga dan antara penyuluh dengan petani, ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas, disposisi atau komitmen penyuluh dalam menjalankan tugasnya, serta konsistensi struktur birokrasi dan koordinasi antarinstansi terkait. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi program penyuluhan pertanian di BPP Walantaka sebagian besar telah berjalan baik sesuai dimensi implementasi kebijakan menurut Edwards III, kecuali pada dimensi sumber daya yang belum optimal, sehingga tetap diperlukan penguatan sumber daya dan koordinasi kelembagaan, termasuk penguatan komunikasi antara BPP Walantaka dan Kecamatan Walantaka, untuk mengoptimalkan pelayanan penyuluhan bagi petani di masa depan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Penyuluhan Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian, Edwards III

Abstract: The background of this research is the importance of the role of agricultural extension as a strategic instrument in national agricultural development, as well as the existence of gaps between the provisions for implementing agricultural extension services as mandated by Law Number 16 of 2006 concerning the Agricultural, Fisheries, and Forestry Extension System and the conditions in the field, such as the limited number of extension workers, low active participation of farmers, and the suboptimal availability of supporting facilities and infrastructure for extension activities. The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of the agricultural extension program at the Agricultural Extension Center (BPP) Walantaka, viewed from the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure; to identify supporting and inhibiting factors in its implementation; and to formulate efforts that can be carried out to overcome these obstacles. The research method used was descriptive qualitative, with data collection techniques through observation, in-depth interviews with the Head and Coordinator of Agricultural Extension at BPP Walantaka, agricultural extension officers, representatives of Walantaka Subdistrict, active assisted farmers, as well as farmers who have not yet or are not registered as beneficiaries of BPP Walantaka, and documentation studies of agricultural extension programs and related regulations. The results of the study indicate that the implementation of the agricultural extension program at BPP Walantaka can be assessed through the dimensions of communication between institutions and between extension workers and farmers, the availability of human resources, budgets, and facilities, the disposition or commitment of extension workers in carrying out their duties, as well as the consistency of bureaucratic structures and coordination among related institutions. The conclusion of this study is that the implementation of the agricultural extension program at BPP Walantaka has generally been carried out well based on the policy implementation dimensions of Edwards III, except for the resource dimension, which remains suboptimal. Therefore, strengthening resources and institutional coordination is still needed, including improving communication between BPP Walantaka and Walantaka Subdistrict, in order to optimize agricultural extension services for farmers in the future.

Keywords: Policy Implementation, Agricultural Extension, Agricultural Extension Center, Edwards III

PENDAHULUAN

Sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional Indonesia karena berperan dalam mendukung ketahanan pangan, menyediakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga menunjukkan peran penting sektor tersebut dalam pembangunan ekonomi. Pada triwulan III tahun 2025, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 14,35% terhadap PDB nasional dan menjadi kontributor terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pertanian perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan dan program yang mampu meningkatkan kapasitas serta produktivitas pelaku usaha pertanian.

Salah satu instrumen strategis dalam pembangunan pertanian adalah penyuluhan pertanian. Penyuluhan merupakan proses pembelajaran yang ditujukan kepada petani dan pelaku usaha tani agar mampu meningkatkan kapasitas, mengakses informasi, memanfaatkan teknologi, serta mengembangkan usaha pertanian secara lebih produktif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, penyuluh pertanian tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan mitra belajar bagi petani. Pendekatan penyuluhan yang partisipatif memungkinkan petani terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga informasi dan inovasi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan mereka. Peran tersebut menjadi semakin penting seiring dengan perubahan iklim, perkembangan teknologi digital, dan dinamika harga komoditas pertanian yang menuntut petani untuk mampu beradaptasi secara berkelanjutan (Sabir, Apriani, & Al Afgani, 2020).

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Indonesia memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek penyelenggaraan penyuluhan, meliputi kelembagaan, ketenagaan, pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan. Dalam kerangka tersebut, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) menjadi salah satu kelembagaan penting dalam pelaksanaan penyuluhan pada tingkat kecamatan. BPP memiliki peran dalam menyusun program penyuluhan, melaksanakan kegiatan penyuluhan, menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi serta sarana produksi, memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan petani, meningkatkan kapasitas penyuluh, serta melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006).

Penguatan penyelenggaraan penyuluhan selanjutnya dilakukan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian. Kebijakan tersebut menekankan sinergi penyelenggaraan penyuluhan pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan melalui tahapan perencanaan, pembinaan dan penguatan hubungan kerja, pengawasan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi. Di sisi lain, pendekatan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) menempatkan BPP sebagai pusat data dan informasi pertanian, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, serta pusat pengembangan jejaring kemitraan. Dengan demikian, BPP tidak hanya dituntut melaksanakan kegiatan penyuluhan secara konvensional, tetapi juga mampu menjalankan fungsi koordinasi, penyediaan informasi, dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pembangunan pertanian (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019).

Dalam konteks daerah, penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kota Serang didukung oleh Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi serta Peraturan Wali Kota Serang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang. Regulasi tersebut memberikan landasan bagi pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah dalam penyusunan kebijakan dan program pertanian, pembinaan kelembagaan dan ketenagaan, peningkatan kapasitas penyuluh, pengembangan metode dan informasi penyuluhan, serta pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, penyuluhan pertanian di Kecamatan Walantaka memiliki dasar kebijakan yang berjenjang dari tingkat nasional hingga daerah.

Kecamatan Walantaka merupakan wilayah yang masih memiliki basis pertanian yang cukup kuat. Data penggunaan lahan menunjukkan bahwa lahan sawah dan lahan pertanian bukan sawah mencapai 3.360,5 hektare atau sekitar 78,78% dari total luas wilayah Kecamatan Walantaka. Selain itu, terdapat 64 kelompok tani dengan jumlah anggota mencapai 3.136 orang yang tersebar pada 14 kelurahan. Besarnya luas lahan pertanian dan jumlah kelompok serta anggota kelompok tani tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pelayanan penyuluhan pertanian di wilayah Walantaka relatif besar. Pada saat yang sama, perkembangan wilayah perkotaan memberikan tantangan berupa tekanan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan industri, sehingga pendampingan kepada petani menjadi semakin penting untuk menjaga keberlanjutan usaha pertanian.

BPP Walantaka sebagai kelembagaan penyuluhan pada tingkat kecamatan memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan penyuluhan, pendampingan teknologi, serta fasilitasi akses informasi kepada petani dan kelompok tani. Berdasarkan data struktur organisasi, BPP Walantaka didukung oleh tujuh tenaga penyuluh yang terdiri atas satu koordinator penyuluh pertanian dan enam penyuluh wilayah binaan untuk melayani 14 kelurahan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya beban pelayanan yang perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan kesesuaian antara jumlah tenaga penyuluh, luas wilayah binaan, dan jumlah petani yang harus mendapatkan pendampingan. Selain aspek ketenagaan, pelaksanaan penyuluhan juga berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan teknologi informasi sebagai bagian dari penguatan fungsi BPP.

Permasalahan implementasi penyuluhan pertanian tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, tetapi juga mencakup komunikasi, koordinasi, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian Astari, Padmaningrum, dan Rusdiyana (2023) menunjukkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan masih menghadapi kesenjangan antara target program dan capaian di lapangan yang berkaitan dengan keterbatasan jumlah dan kapasitas penyuluh, sarana dan prasarana, serta tingkat adopsi inovasi teknologi oleh petani. Sementara itu, penelitian Gunade dan Sagita (2024) menunjukkan bahwa kinerja penyuluh pada tingkat BPP dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan, fasilitas, dan motivasi penyuluh dalam menjalankan kegiatan pendampingan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan program penyuluhan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan menjadi kegiatan yang efektif di lapangan.

Kondisi tersebut relevan untuk dikaji di BPP Walantaka karena masih terdapat sejumlah persoalan dalam implementasi program penyuluhan, antara lain keterbatasan rasio tenaga penyuluh terhadap jumlah petani dan wilayah binaan, belum konsistennya partisipasi aktif petani dalam kegiatan penyuluhan, serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung. Di samping itu, komunikasi dan koordinasi antara kelembagaan penyuluhan dengan pihak terkait menjadi faktor penting dalam memastikan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Optimalisasi komunikasi antara penyuluh dan petani juga diperlukan karena penyuluh memiliki posisi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan nyata petani di lapangan (Irdiana, Nurliza, & Kurniati, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai implementasi program penyuluhan pertanian di BPP Walantaka menjadi penting dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana program dilaksanakan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Penelitian ini menggunakan perspektif implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menempatkan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai dimensi penting dalam menganalisis implementasi kebijakan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan program penyuluhan pertanian di BPP Walantaka, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian implementasi kebijakan sekaligus menjadi masukan praktis bagi BPP Walantaka dan pemerintah daerah dalam memperkuat penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kecamatan Walantaka.

LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi Program

Implementasi program merupakan tahap ketika kebijakan atau program yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Dalam konteks penyuluhan pertanian, implementasi menjadi penting untuk melihat sejauh mana program yang telah dirancang dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi petani.

Pengertian Penyuluhan

Penyuluhan merupakan proses pendidikan nonformal yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat melalui proses pembelajaran yang partisipatif. Penyuluhan tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Pendekatan pendidikan nonformal melalui penyuluhan dapat meningkatkan kapasitas dan penghidupan masyarakat sasaran (Mariyono et al., 2021).

Pengertian Pertanian

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati dengan dukungan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan pangan, bahan baku, maupun produk pertanian lainnya. Pertanian mencakup rangkaian kegiatan dari produksi hingga pengolahan dan pemasaran. Dalam perkembangannya, sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, keterbatasan regenerasi petani, dan rendahnya adopsi teknologi, sehingga penguatan kelembagaan penyuluhan menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan pertanian (Mariyanto & Muda, 2025).

Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mampu mengakses informasi, teknologi, permodalan, serta sumber daya lainnya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, pendapatan, dan kesejahteraan. Penyuluhan menempatkan petani sebagai subjek aktif sehingga pelaksanaannya perlu bersifat dialogis, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan petani (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006).

Penyuluhan pertanian memiliki fungsi edukasi, diseminasi informasi, fasilitasi, konsultasi, serta supervisi. Untuk menjalankan fungsi tersebut, penyuluh membutuhkan kompetensi teknis, manajerial, komunikasi, dan digital (Fitri, Hasanuddin, & Ibnu, 2024).

Metode penyuluhan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, maupun massal melalui berbagai media. Pemilihan metode perlu disesuaikan dengan karakteristik petani, kompleksitas teknologi, serta sumber daya yang tersedia. Komunikasi dan interaksi yang baik

antara penyuluh dan petani berperan dalam meningkatkan adopsi inovasi pertanian (Fitriana & Setiawan, 2023).

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan kelembagaan penyuluhan pemerintah pada tingkat kecamatan yang berperan sebagai pelaksana utama kegiatan penyuluhan dan penghubung antara kebijakan pemerintah dengan petani. BPP melaksanakan program penyuluhan, memberikan pelayanan informasi, serta mendukung pengembangan kapasitas petani sesuai kondisi wilayah (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006).

Dalam kerangka Kostratani, peran BPP diperluas sebagai pusat data dan informasi pertanian, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat pengembangan jejaring dan kemitraan, serta pusat konsultasi agribisnis (Purwandari, Sente, & Tunisa, 2020).

Salah satu tantangan BPP adalah keterbatasan jumlah tenaga penyuluh dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah petani yang harus dilayani. Kondisi tersebut dapat memengaruhi intensitas kunjungan dan kualitas pendampingan kepada petani (Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, 2025).

BPP juga berperan dalam mendorong perkembangan kelompok tani. Persepsi positif petani terhadap peran BPP dan penyuluh berkaitan dengan perkembangan serta kemandirian kelompok tani, sehingga peningkatan kualitas pelayanan BPP menjadi bagian penting dalam pemberdayaan petani (Alfatih, Soepratikno, & Effendi, 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami dan menganalisis implementasi program penyuluhan pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Walantaka, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi dan proses pelaksanaan program berdasarkan pengalaman serta pandangan para pihak yang terlibat secara langsung tanpa melakukan manipulasi terhadap kondisi di lapangan (Sugiyono, 2020). Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan program penyuluhan serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi BPP Walantaka.

Analisis implementasi program menggunakan empat dimensi implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dimensi komunikasi meliputi penyampaian dan kejelasan informasi, sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas, disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana, sedangkan struktur birokrasi mencakup prosedur dan koordinasi kelembagaan. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis pelaksanaan program penyuluhan serta mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penyuluhan, sedangkan data sekunder diperoleh dari program dan laporan kegiatan BPP Walantaka, regulasi terkait, data Badan Pusat Statistik, serta literatur dan jurnal yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat pelaksanaan kegiatan secara langsung, wawancara untuk menggali pengalaman dan pandangan informan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data hasil observasi dan wawancara (Sugiyono, 2020).

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan posisi, pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan mereka dalam program penyuluhan pertanian. Informan terdiri atas unsur Kecamatan Walantaka, Kepala

sekaligus Koordinator Penyuluhan Pertanian BPP Walantaka, penyuluh pertanian, petani binaan, serta petani yang tidak terdaftar sebagai binaan BPP Walantaka sebagai pembanding. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Penyuluhan Pertanian di BPP Walantaka

Implementasi program penyuluhan pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Walantaka dianalisis menggunakan empat dimensi implementasi kebijakan menurut Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 informan yang terdiri atas unsur BPP, pemerintah Kecamatan Walantaka, petani binaan, dan petani yang belum terdaftar sebagai binaan, implementasi program telah berjalan, terutama pada petani yang telah terhubung dengan kelompok binaan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan sumber daya dan jangkauan pelayanan kepada petani di luar kelompok binaan.

Pada dimensi komunikasi, BPP Walantaka menerapkan pendekatan yang menyesuaikan karakteristik petani. Penyuluh tidak hanya menyampaikan materi secara formal, tetapi juga menggunakan percakapan, kunjungan lapangan, dan penggalian pengalaman petani. Petani binaan menyatakan bahwa informasi yang diberikan mudah dipahami dan kunjungan penyuluh dilakukan secara berkala, terutama pada masa tanam. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi antara penyuluh dan petani binaan telah berlangsung secara dialogis dan sesuai dengan kondisi penerima program. Pendekatan tersebut sejalan dengan Fitriana dan Setiawan (2023) yang menunjukkan pentingnya penyuluhan dalam proses penerimaan informasi dan adopsi inovasi oleh petani.

Meskipun demikian, komunikasi belum menjangkau seluruh petani secara merata. Petani yang tidak terdaftar sebagai binaan di Kelurahan Kalodran, Pipitan, dan Pageragung menyatakan belum mengetahui program penyuluhan BPP Walantaka dan sebagian belum pernah memperoleh kunjungan penyuluh. Dengan demikian, persoalan komunikasi bukan terutama terletak pada kejelasan materi bagi petani binaan, tetapi pada transmisi informasi kepada petani yang belum terhubung dengan program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi telah berjalan efektif pada sasaran internal, tetapi jangkauannya masih terbatas.

Pada dimensi sumber daya, ditemukan kendala yang lebih dominan. Seorang penyuluh masih menangani dua hingga empat kelurahan, sedangkan fasilitas kerja seperti kendaraan, laptop, dan peralatan teknis penyuluhan belum sepenuhnya tersedia. Keterbatasan tersebut berdampak pada mobilitas, administrasi, dan kemampuan penyuluh melakukan kunjungan secara rutin kepada seluruh petani. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu Djajali, Imran, dan Rauf serta Gunade dan Sagita yang menunjukkan pentingnya kecukupan tenaga penyuluh dalam pelaksanaan penyuluhan di tingkat BPP.

Dimensi disposisi menunjukkan kondisi yang relatif baik. Para penyuluh memiliki komitmen dan motivasi dalam menjalankan tugas pendampingan. Komitmen tersebut terlihat dari kesediaan penyuluh membantu petani menyelesaikan persoalan budidaya dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan mereka. Penilaian petani binaan juga menunjukkan bahwa penyuluh dinilai ramah, aktif melakukan kunjungan, dan memberikan pendampingan. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya tidak secara langsung menurunkan komitmen pelaksana, bahkan sikap positif penyuluh menjadi salah satu faktor yang mempertahankan keberlangsungan program.

Pada dimensi struktur birokrasi, BPP Walantaka telah memiliki pembagian wilayah kerja dan tugas penyuluh yang ditetapkan secara formal. Pelaksanaan program juga dilakukan melalui tahapan koordinasi, sosialisasi, pendampingan, pengawalan, monitoring, dan evaluasi. Hubungan antara BPP, Dinas Pertanian, dan Kecamatan Walantaka dinilai cukup jelas oleh

informan. Namun, mekanisme penjangkauan terhadap petani yang belum terdaftar belum terlihat secara optimal. Artinya, struktur internal BPP telah berjalan, tetapi perlu diperkuat pada mekanisme perluasan sasaran program.

Secara keseluruhan, implementasi program penyuluhan pertanian di BPP Walantaka dapat dikategorikan telah berjalan tetapi belum optimal. Kekuatan utama terdapat pada komunikasi dengan petani binaan, komitmen penyuluh, serta pembagian tugas dan koordinasi internal. Kelemahan utama terdapat pada keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang kemudian berpengaruh terhadap luas jangkauan pelayanan penyuluhan.

Faktor Pendukung Implementasi Program Penyuluhan Pertanian

Hasil penelitian menunjukkan empat faktor utama yang mendukung implementasi program, yaitu komunikasi dan koordinasi antarlembaga, kompetensi serta pengalaman penyuluh, keberadaan kelompok tani, dan kejelasan pembagian tugas. Keempat faktor tersebut saling melengkapi dalam menjaga keberlangsungan program meskipun terdapat keterbatasan sumber daya fisik.

Komunikasi dan koordinasi antara BPP Walantaka dengan pemerintah Kecamatan Walantaka menjadi salah satu faktor pendukung penting. Koordinasi dilakukan mulai dari penentuan sasaran, sosialisasi, pendampingan, pengawalan hingga monitoring dan evaluasi. Pemerintah kecamatan juga memberikan dukungan berupa personel, peralatan, dan tenaga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi program tidak hanya bergantung pada BPP, tetapi juga didukung oleh hubungan kerja antarlembaga yang berkelanjutan.

Faktor berikutnya adalah kompetensi dan pengalaman penyuluh. Latar belakang pendidikan pertanian, pengalaman kerja, pengalaman lapangan, serta proses belajar antarpelaksana membantu penyuluh menghadapi karakter petani yang beragam. Dalam perspektif Edwards III, kompetensi pelaksana merupakan bagian dari sumber daya yang dapat mempertahankan pelaksanaan program meskipun fasilitas belum sepenuhnya memadai.

Keberadaan kelompok tani juga menjadi faktor pendukung karena berfungsi sebagai penghubung antara petani dengan penyuluh dan program pemerintah. Petani binaan memperoleh kemudahan dalam mendapatkan informasi, bantuan, pupuk, bibit, serta pendampingan melalui kelompok tani. Sebaliknya, petani yang tidak tergabung dalam kelompok cenderung memiliki akses yang lebih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok tani bukan hanya wadah administratif, tetapi juga saluran pelayanan yang membantu program mencapai petani.

Selain itu, kejelasan pembagian tugas dan wilayah kerja menjadi faktor pendukung implementasi. Wilayah binaan telah dibagi kepada penyuluh dan ditetapkan secara formal, sehingga tanggung jawab masing-masing penyuluh menjadi lebih jelas. Koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Kecamatan Walantaka juga mendukung keteraturan pelaksanaan program. Dalam perspektif Edwards III, struktur dan prosedur yang jelas memberikan dasar bagi pelaksana untuk menjalankan tugas secara terarah dan konsisten.

Faktor Penghambat Implementasi Program Penyuluhan Pertanian

Terdapat tiga faktor utama yang menghambat implementasi program penyuluhan pertanian di BPP Walantaka, yaitu keterbatasan sumber daya penyuluh, perbedaan karakteristik dan tingkat penerimaan petani, serta minimnya penjangkauan terhadap petani yang belum terdaftar sebagai binaan.

Hambatan paling menonjol terdapat pada keterbatasan sumber daya. Jumlah penyuluh belum sebanding dengan luas wilayah pelayanan karena seorang penyuluh dapat menangani beberapa keluhan sekaligus. Selain itu, kendaraan, laptop, dan peralatan teknis penyuluhan belum tersedia secara memadai. Keterbatasan tersebut menyebabkan penyuluh mengalami kendala dalam mobilitas, pendataan, dan pelaksanaan kunjungan secara rutin. Dalam perspektif

Edwards III, kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dapat membatasi kemampuan pelaksana dalam mencapai sasaran program secara optimal.

Hambatan kedua adalah perbedaan karakteristik dan penerimaan petani. Petani pada setiap kelompok dan wilayah memiliki latar belakang, pengalaman, kebutuhan, serta tingkat penerimaan terhadap inovasi yang berbeda. Sebagian petani dapat menerima informasi dengan cepat, sedangkan sebagian lainnya membutuhkan pendekatan yang lebih personal dan bertahap. Kondisi ini menuntut penyuluh untuk menyesuaikan metode komunikasi agar materi dapat diterima sesuai karakteristik masing-masing petani.

Hambatan ketiga adalah minimnya penjangkauan petani yang belum terdaftar sebagai binaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa petani non-binaan belum mengetahui program BPP, belum pernah mendapatkan kunjungan penyuluh, dan belum memahami mekanisme untuk terhubung dengan program. Kondisi ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh rendahnya minat petani karena sebagian informan menyatakan bersedia mengikuti program apabila memperoleh informasi dan kesempatan untuk bergabung. Dengan demikian, persoalannya lebih berkaitan dengan keterbatasan transmisi informasi dan kapasitas penjangkauan BPP.

Ketiga hambatan tersebut saling berkaitan. Keterbatasan tenaga dan fasilitas membatasi intensitas pelayanan, sedangkan perbedaan karakter petani membutuhkan pendekatan yang berbeda. Pada saat yang sama, keterbatasan waktu dan tenaga membuat penyuluh lebih mudah mempertahankan pendampingan kepada petani yang telah tergabung dalam kelompok binaan dibandingkan menjangkau petani di luar kelompok tersebut. Dengan demikian, persoalan implementasi bukan hanya bersifat internal, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antara pelaksana dan sasaran program.

Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

BPP Walantaka melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan implementasi, yaitu pendampingan analisis usaha tani, penyesuaian pendekatan dengan karakteristik petani, serta penguatan dukungan sumber daya dan koordinasi kelembagaan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penyuluh tidak hanya menjalankan program sesuai prosedur, tetapi juga melakukan adaptasi terhadap kondisi nyata di lapangan.

Pertama, pendampingan analisis usaha tani dilakukan untuk membantu petani menghadapi keterbatasan ekonomi dan mengelola kebutuhan usaha tani secara lebih terencana. Penyuluh mengarahkan petani untuk memperhitungkan kebutuhan pupuk, benih, tenaga kerja, dan alat pertanian. Pendekatan ini memperluas fungsi penyuluhan dari sekadar penyampaian informasi teknis menjadi pendampingan dalam pengelolaan usaha tani.

Kedua, penyuluh melakukan penyesuaian strategi komunikasi berdasarkan karakteristik petani. Pendekatan dilakukan secara fleksibel melalui kedekatan hubungan, percakapan sehari-hari, diskusi, dan pemanfaatan pertemuan di lahan pertanian. Strategi tersebut memungkinkan materi disampaikan secara bertahap sehingga lebih mudah diterima oleh petani. Temuan ini sejalan dengan Fitriana dan Setiawan (2023) yang menempatkan proses penyuluhan sebagai bagian penting dalam penerimaan informasi dan inovasi oleh petani.

Ketiga, dilakukan penguatan dukungan sumber daya dan kelembagaan melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan serta upaya peningkatan personel dan peralatan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tenaga penyuluh, peningkatan fasilitas, dan penyederhanaan prosedur bantuan masih menjadi kebutuhan pada tingkat kelembagaan yang lebih tinggi. Dengan demikian, strategi adaptif yang dilakukan penyuluh mampu menjaga program tetap berjalan, tetapi belum dapat sepenuhnya menggantikan kebutuhan sumber daya struktural.

Secara keseluruhan, upaya BPP Walantaka dalam mengatasi hambatan bersifat adaptif dan bertahap. Pendampingan usaha tani serta penyesuaian komunikasi telah dilakukan langsung

oleh penyuluh, sedangkan penambahan tenaga, fasilitas, dan penyederhanaan birokrasi membutuhkan dukungan pemerintah pada tingkat yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program penyuluhan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu penyuluh, tetapi juga pada dukungan sumber daya dan kelembagaan yang memadai.

Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan keempat dimensi Edwards III, implementasi program penyuluhan pertanian di BPP Walantaka menunjukkan kondisi yang relatif baik pada komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi, terutama bagi petani yang telah terhubung dengan program. Sebaliknya, sumber daya menjadi aspek yang paling perlu diperkuat, khususnya jumlah tenaga penyuluh, fasilitas kerja, mobilitas, dan kemampuan menjangkau petani secara lebih luas.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa keberadaan kelompok tani dan koordinasi antarlembaga menjadi mekanisme penting yang memungkinkan program tetap berjalan di tengah keterbatasan sumber daya. Namun, ketergantungan yang cukup besar pada kelompok binaan menyebabkan sebagian petani di luar kelompok belum memperoleh informasi dan pelayanan secara merata. Oleh karena itu, penguatan sumber daya sekaligus perluasan mekanisme penjangkauan menjadi aspek penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi program penyuluhan pertanian di BPP Walantaka.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Penyuluhan Pertanian di BPP Walantaka Kecamatan Walantaka Kota Serang secara umum telah berjalan baik, terutama pada aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, aspek sumber daya masih belum optimal, ditandai dengan keterbatasan jumlah penyuluh dan fasilitas pendukung kegiatan penyuluhan.

Faktor pendukung implementasi meliputi komunikasi yang partisipatif, kompetensi dan kewenangan formal penyuluh, motivasi kerja yang tinggi, serta adanya SOP dan koordinasi yang terstruktur. Sementara itu, faktor penghambat terutama berupa keterbatasan tenaga dan fasilitas penyuluh serta proses administratif bantuan pertanian yang masih membutuhkan waktu.

Upaya mengatasi hambatan dilakukan melalui penyesuaian strategi komunikasi dengan karakteristik petani dan pemenuhan kebutuhan operasional secara mandiri oleh penyuluh. Dukungan dari Kecamatan Walantaka juga mulai diberikan, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek sumber daya dan koordinasi antara pihak kecamatan dengan pelaksana teknis.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi program di BPP Walantaka didukung oleh komitmen penyuluh dan koordinasi kelembagaan, tetapi peningkatan efektivitas program masih memerlukan penambahan tenaga penyuluh, pemenuhan fasilitas kerja, penyederhanaan administrasi bantuan, serta perluasan jangkauan pelayanan kepada petani.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan S D M. *Buku Data Statistik SDM Pendidikan Pertanian 2024*. Jakarta: Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, 2025.
- Purwandari, Sintha Eliestya, Umning Sente, and Hijrah Tunisa. *KOSTRATANI Komando Strategis Pembangunan Pertanian*. Kalimantan Tengah: BPTP Kalteng, 2020.

- Sabir, M Issac Maulana, Wulansari Apriani, and Jamaluddin Al Afgani. SERI 1 Penyuluhan Pertanian. Gowa: Polbangtan Gowa, 2020.
- . SERI II Penyuluhan Pertanian. Gowa: Polbangtan Gowa, 2020.
- Siagian, Sondang P. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, Dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Sirnawati, Enti, Retno Sri Hartati Mulyandari, and Nyoman Widiarta. Urgensi Penyuluhan Pertanian Baru Di Indonesia. Jakarta: IAARD Press, 2020.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Syafie, Inu Kencana. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.

JURNAL

- Alfatih, M, S Soepratikno, and I Effendi. “Persepsi Petani Terhadap Peranan Penyuluh Pertanian Dalam Pengembangan Kelompok Tani Di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.” *Suluh Pembangunan: Journal of Extension and Development* 6, no. 1 (2024): 63–73.
- Astari, Rizka Dwi, Dwiningtyas Padmaningrum, and Eksa Rusdiyana. “Evaluasi Kinerja Penyuluh Dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Lahan Kering.” *JURNAL TRITON* 14, no. 1 (2023): 29–44.
- Djajali, Trisud Yayan, Supriyo Imran, and Asda Rauf. “Analisis Kinerja Penyuluh Pertanian Melalui Program Kostratani Di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo.” *EJurnal Universitas Negeri Gorontalo*, 2024.
- Fitri, N, T Hasanuddin, and M Ibnu. “Kompetensi Penyuluh Pertanian Masa Depan (Studi Kasus Di Provinsi Lampung).” *Suluh Pembangunan: Journal of Extension and Development* 6, no. 1 (2024): 74–84.
- Fitriana, Nisa Hafi Idhoh, and Risqi Firdaus Setiawan. “Peran Penyuluhan Pertanian Dalam Proses Adopsi Inovasi Di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis* 11, no. 2 (2023): 81–91.
- Gunade, Djayeng Turano, and Sri Dewi Sagita. “Kinerja Penyuluh Pertanian Pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 2785–94.
- Muhajir, Masdar Fatman, and Bangkit Lutfiaji Syaefullah. “Tingkat Kepuasan Petani Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian Di Polewali Mandar Sulawesi Barat.” *Journal of Sustainable Agriculture Extension* 3, no. 2 (2025): 61–69.
- Nurhalizah, Siti, Helvi Yanfika, Sumaryo Gitosaputro, and Dame Trully Gultom. “Kinerja Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara.” *Suluh Pembangunan: Journal of Extension and Development* 5, no. 3 (2023): 228–37.
- Joko Mariyono, Joko Waskito, Suwandi, Tabrani, Any Kuntariningsih, Erlina Latifah, dan Endah Suswati, “Farmer Field School: Non-Formal Education to Enhance Livelihoods of Indonesian Farmer Communities,” *Community Development*, Vol. 52, No. 2, 2021, hlm. 153-168.
- Joko Mariyanto dan A. Muda, “Krisis Global dan Implikasinya bagi Pertanian Indonesia: Perubahan Iklim, Konflik Geopolitik, dan Spekulasi Pasar,” *Jurnal Perencanaan Pembangunan Pertanian*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 22-43.

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (2023).
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) (2019).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (2006).

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (2021).

Peraturan Wali Kota Serang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang (2021).

WEBSITE

Indonesia, Badan Pusat Statistik Republik. “Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, <https://www.bps.go.id>. diakses pada tanggal 11 Juli 2026.

Serang, Badan Pusat Statistik Kota. “Badan Pusat Statistik Kota Serang, <https://serangkota.bps.go.id>. diakses pada tanggal 11 Juli 2026.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Serang, “Profil dan Wilayah Kerja,” <https://distan.serangkota.go.id>, diakses pada tanggal 24 Juli 2026.

Badan Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Banten, “Kota Serang Mantapkan Pencapaian Realisasi LTT Juli,” <https://banten.brmp.pertanian.go.id/berita/kota-serang-mantapkan-pencapaian-realisasi-ltt-juli>, diakses pada tanggal 24 Juli 2026.